

## ABSTRAK

### KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA ERA PRESIDEN JOKO WIDODO DI LAUT NATUNA UTARA TAHUN 2014-2019

Oleh

ZULEIKA ZIHNY MADTARA

Laut Natuna Utara merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Laut Natuna Utara termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Namun, Tiongkok mengklaim wilayah perairan tersebut dengan mengeluarkan peta *Nine Dash Line* atau sembilan garis putus-putus. Klaim Tiongkok terhadap *Nine Dash Line* mencakup perairan yang juga dimiliki oleh negara-negara di sekitar Laut Tiongkok Selatan. Klaim ini memicu konflik antarnegara karena adanya kepentingan di kawasan tersebut, termasuk kepentingan Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kepentingan nasional Indonesia pada Era Presiden Joko Widodo di Laut Natuna Utara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Donald E. Nuechterlein. Metode yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif, didukung oleh data sekunder yang diambil dari laman resmi Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta sumber daring seperti Kompas, CNN, BBC, dan sumber relevan lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan nasional Indonesia di Laut Natuna Utara berhubungan dengan visi Poros Maritim Dunia Presiden Joko Widodo. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kepentingan nasional Indonesia di kawasan tersebut mencakup kepentingan pertahanan, ekonomi, tata internasional, dan ideologi. Dalam hal kepentingan pertahanan, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk melindungi kedaulatan wilayah sembari menghindari peningkatan konflik militer di kawasan. Pada kepentingan ekonomi Indonesia mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kemampuan ekspor-impor di wilayah tersebut. Pada kepentingan tata internasional Indonesia berupaya melalui diplomasi dan politik militer dalam mempromosikan perdamaian. Pada kepentingan ideologi Indonesia menjaga identitas sebagai negara kepulauan.

**Kata Kunci** : Kepentingan Nasional Indonesia, Klaim Tiongkok, Laut Natuna Utara, *Nine Dash Line*, Presiden Joko Widodo.

## **ABSTRACT**

### **INDONESIA NATIONAL INTERESTS IN THE ERA OF PRESIDENT JOKO WIDODO IN THE NORTH NATUNA SEA IN 2014-2019**

**By**

**ZULEIKA ZIHNY MADTARA**

The North Natuna Sea is part of the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). According to the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, the North Natuna Sea falls within Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ). However, China has claimed this maritime area by issuing the Nine Dash Line map. China's claim over the Nine Dash Line includes waters that also belong to neighboring countries around the South China Sea. This claim has triggered conflicts among nations due to the competing interests in the region, including Indonesia's interests. This research aims to describe how Indonesia's national interests during the presidency of Joko Widodo in the North Natuna Sea. The theory used in this study was the national interest theory proposed by Donald E. Nuechterlein. This research used a descriptive qualitative method, supported by secondary data obtained from the official websites of the Ministry of Foreign Affairs, the Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, this research also used online sources such as Kompas, CNN, BBC, and other relevant sources. The research found research result that Indonesia's national interests in the North Natuna Sea are related to President Joko Widodo's vision of the Global Maritime Axis. Furthermore, the study found that Indonesia's national interests in the region encompass defense, economic, international order, and ideological interests. Regarding defense interests, Indonesia has demonstrated its commitment to protecting its territorial sovereignty while avoiding an escalation of military conflicts in the area. In terms of economic interests, Indonesia has supported economic activities and enhanced its import-export capabilities in the region. Regarding international order interests, Indonesia has strived through diplomacy and military policy to promote peace. In terms of ideological interests, Indonesia has maintained its identity as an archipelagic state.

**Keywords:** Indonesian National Interests, Tiongkok Claims, North Natuna Sea, Nine Dash Line, President Joko Widodo.